



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah daerah secara efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk melaksanakan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banjar agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan perlu menyusun peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Banjar;
- c. bahwa dalam rangka kepastian hukum dalam menetapkan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Banjar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

BAB II
PETA PROSES BISNIS

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah terdiri atas beberapa tingkatan, yaitu:

- a. level 0;
- b. level 1; dan
- c. level n

Pasal 4

Tingkatan level 0 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan proses inti/utama, proses pendukung/manajerial dan proses lainnya.

Pasal 5

Tingkatan level 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan uraian penjabaran dari level 0.

Pasal 6

Tingkatan level n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1 yang selanjutnya diturunkan menjadi rincian program pada level 2 dan seterusnya pada Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah.

Level akhir pada Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP) Perangkat Daerah.

Pasal 7

Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar organisasi dalam menghasilkan kinerja sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Pasal 8

Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH
KABUPATEN BANJAR

PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Banjar menggunakan level. Penyusunan peta proses bisnis menggunakan level atau tingkatan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut. Jumlah level peta proses bisnis sangat tergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis.

a. Ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan:

1. Visi Kabupaten Banjar “TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI, DAN AGAMIS”
2. Misi Kabupaten Banjar yang teruang dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yakni:
 - 1) Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia.
 - 2) Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan.
 - 3) Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
 - 4) Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.
 - 5) Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis.
3. Tujuan:
 - 1) Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.
 - 2) Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas.
 - 3) Terwujudnya penurunan kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan dan angka pengangguran.
 - 4) Terwujudnya masyarakat yang berkarakter dan memiliki kepribadian yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur.
 - 5) Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan efektif.
 - 6) Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

b. Fungsi berdasarkan analisis dokumen pendukung dan analisis visi, misi, serta tujuan.

- 1) *Good Governance* (F1)
- 2) Sumber daya manusia dan masyarakat berkualitas (F2)
- 3) Ekonomi kerakyatan pembangunan berkelanjutan (F3)

c. Tingkatan Peta Proses Bisnis, sebagai berikut:

1. Level 0.

a. Proses Inti/Utama

Proses inti/utama merupakan proses yang berkaitan langsung pencapaian keberhasilan visi dan misi daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yakni :

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas (BJR F2_01)
2. Terwujudnya masyarakat yang berkarakter dan memiliki kepribadian yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur (BJR F2_02)
3. Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas (BJR F3_01)
4. Terwujudnya penurunan kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan dan angka pengangguran (BJR F3_02)
5. Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (BJR F3_03)

b. Proses Pendukung/manajerial

Proses pendukung/manajerial merupakan proses yang berkaitan langsung pencapaian keberhasilan visi dan misi daerah yang teruang dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yang bersifat manajerial pengaturan proses ke dalam organisasi, yakni "Terwujudnya Birokrasi yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif" (BJR F1_01).

c. Proses Lainnya

2. Level 1.

Secara rinci uraian penjabaran level 0 ke dalam level 1 sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan efektif (BJR F1_01).
 1. Terselenggaranya reformasi dalam sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja (BJR F1_1.1)
 2. Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik (BJR F1_1.2)
 3. Terselenggaranya birokrasi yang bersih, profesional dan berbasis elektronik (BJR F1_1.3).
- 2) Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas (BJR F2_01)
 1. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas melalui pengembangan pendidikan dan sistem kesehatan (BJR F2_1.1)
 2. Meningkatnya ketangguhan masyarakat melalui peningkatan daya beli, ketahanan pangan dan gizi serta pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak (BJR F2_1.2)
- 3) Terwujudnya masyarakat yang berkarakter dan memiliki kepribadian yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur (BJR F2_02)

1. Meningkatkan pengamalan nilai- nilai Pancasila, agama dan budaya (BJR F2_2.1)
 2. Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat (BJR F2_2.2)
 - 4) Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas (BJR F3_01)
 1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi (BJR F3_1.1)
 2. Meningkatkan keunggulan pertanian dan perikanan (BJR F3_1.2)
 3. Meningkatkan akselerasi industri pengolahan, ekonomi kreatif dan pariwisata, serta ekonomi digital (BJR F3_1.3)
 - 5) Terwujudnya penurunan kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan dan angka pengangguran (BJR F3_02)
 1. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan serta berkembangnya reformasi sistem perlindungan sosial (BJR F3_2.1)
 2. Menurunnya angka pengangguran dan berkembangnya produktivitas dan daya saing koperasi dan usaha mikro serta kemandirian ekonomi keluarga (BJR F3_2.2)
 3. Berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produksi pertanian dan perikanan dan pemantapan infrastruktur pembangunan (BJR F3_2.3)
 - 6) Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (BJR F3_03)
 1. Terwujudnya penataan ruang dan permukiman yang terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan daerah (BJR F3_3.1)
 2. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan untuk pembangunan berkelanjutan (BJR F3_3.2)
3. Level Selanjutnya (Level n).

Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1 yang selanjutnya akan diturunkan menjadi rincian program pada level 2 dan seterusnya pada level Perangkat Daerah.

Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Banjar.

PETA PROSES BISNIS LEVEL 0

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN
FUNGSI 1 : GOOD GOVERNANCE

MANAJERIAL

Terwujudnya birokrasi
yang amanah, baik,
bersih dan efektif

BJR F1_01

UTAMA

LAINNYA

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN

BJR F1_01

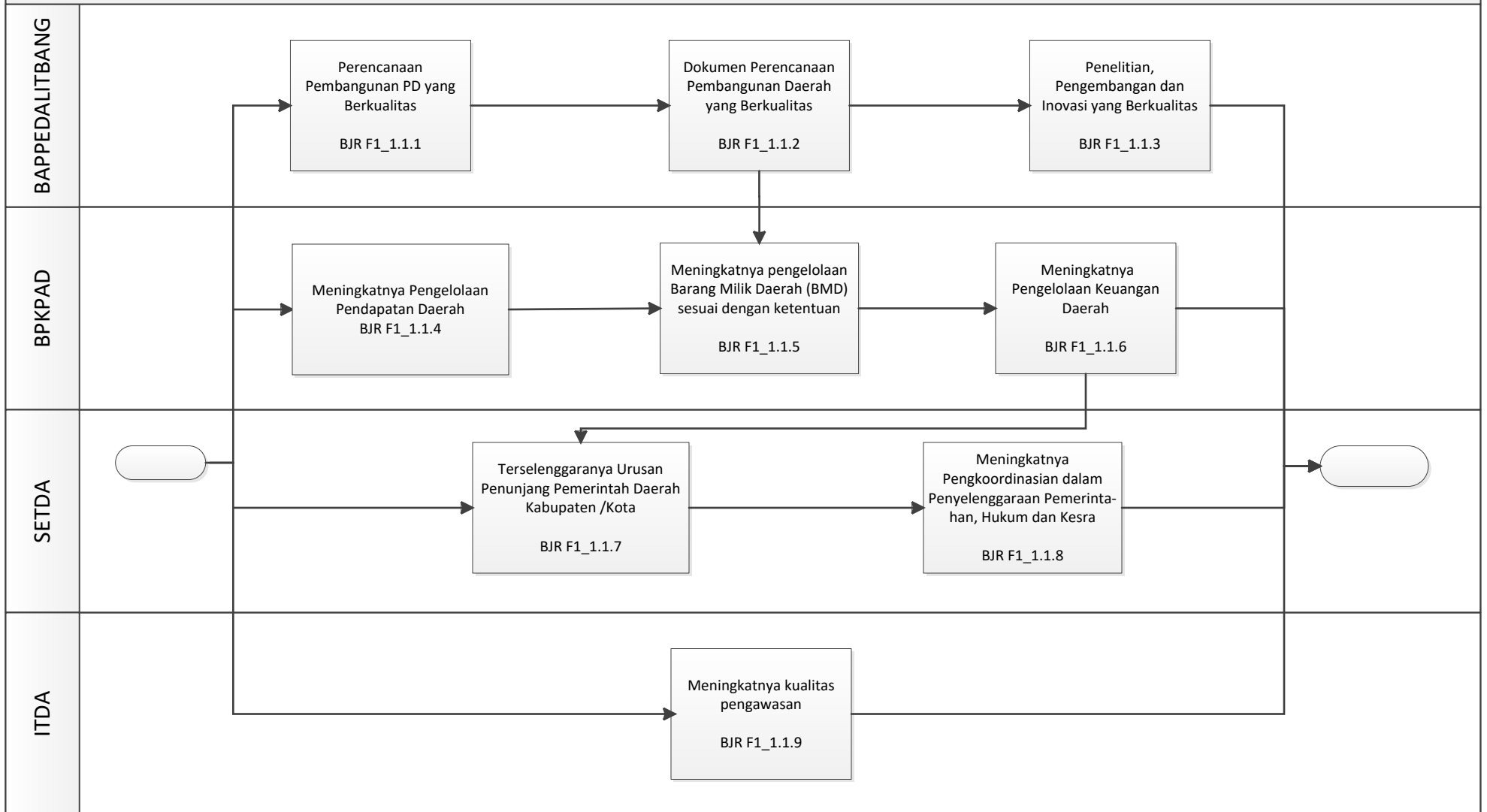
Terselenggaranya reformasi dalam sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja
BJR F1_1.1

Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik
BJR F1_1.2

Terselenggaranya birokrasi yang bersih, Profesional dan berbasis elektronik
BJR F1_1.3

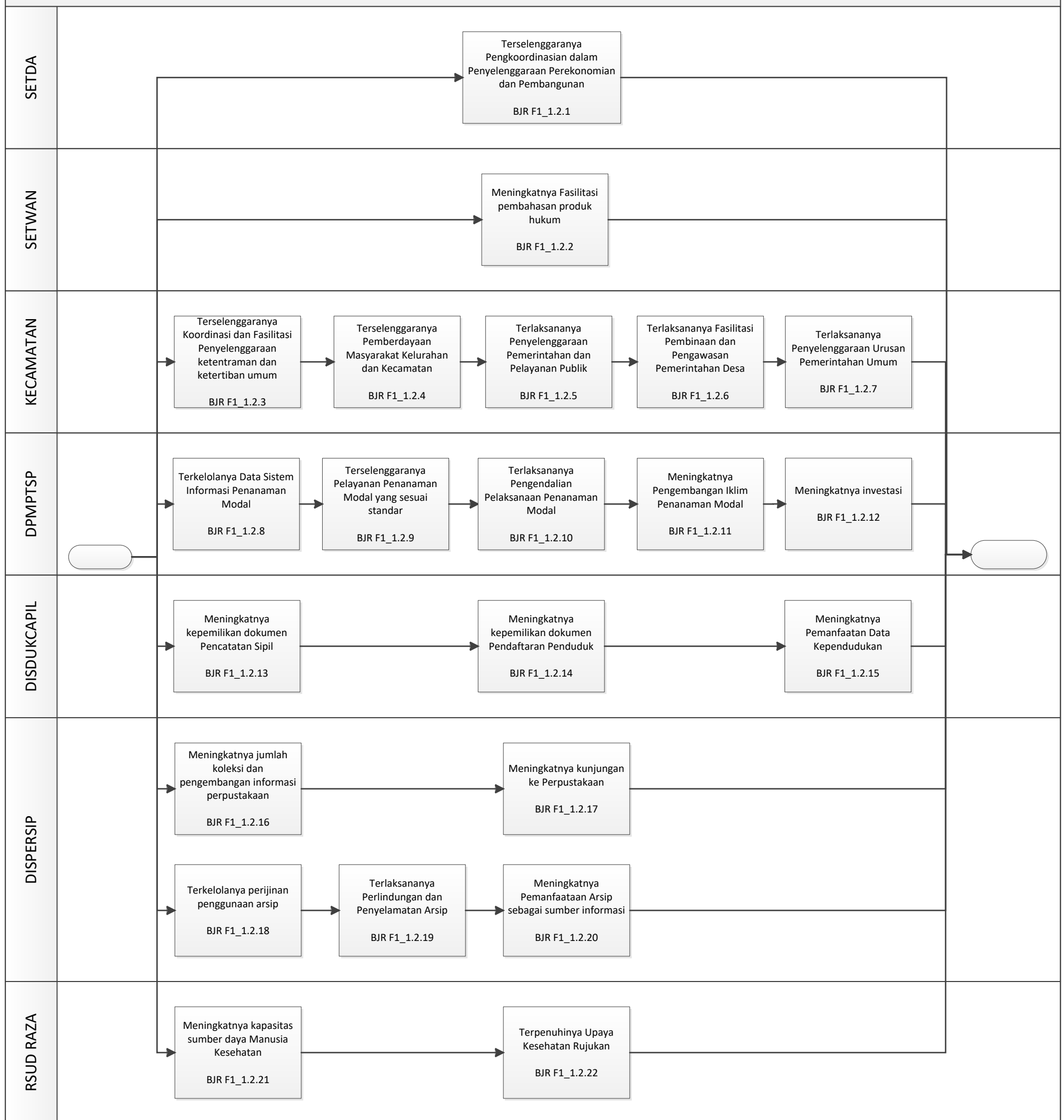
PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 (BJR F1_1.1)

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN
TERSELENGGARANYA REFORMASI DALAM SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA



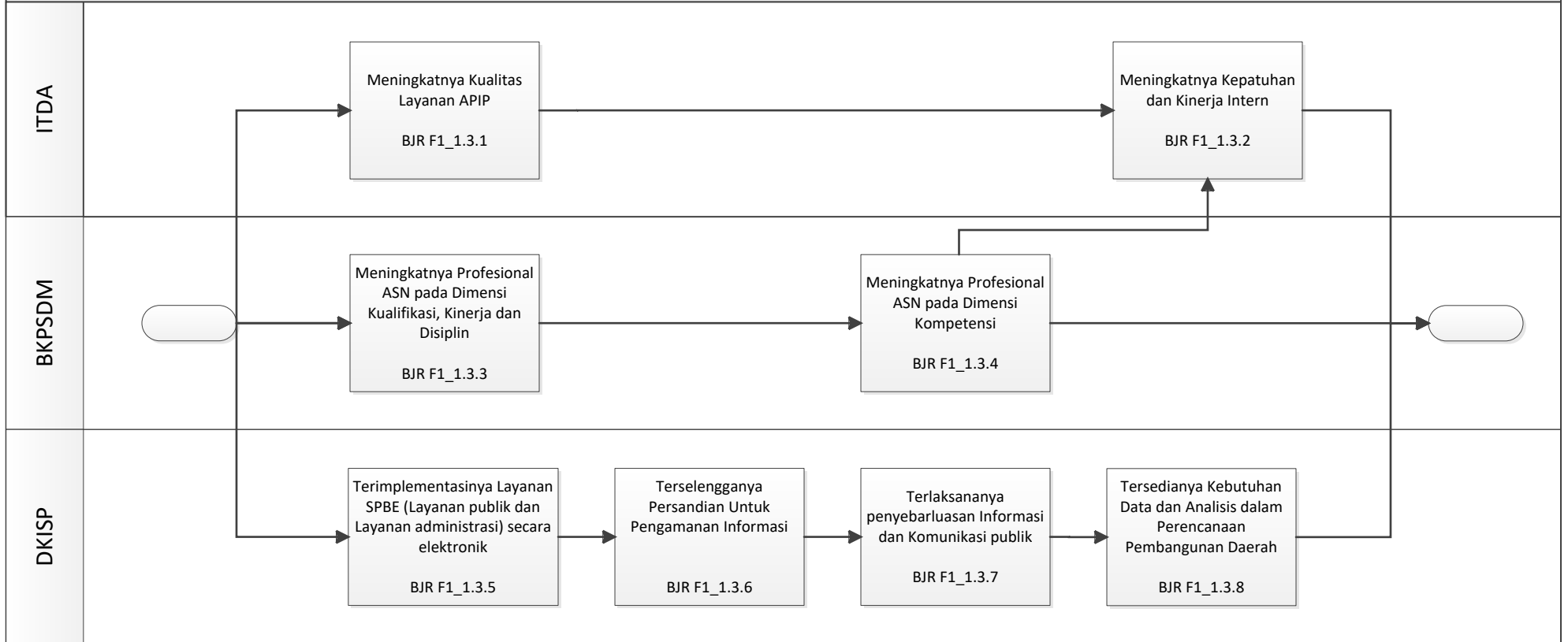
PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 (BJR F1_1.2)

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN
TERSELENGGARANYA REFORMASI DALAM PELAYANAN PUBLIK



PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 (BJR F1_1.3)

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN TERSELENGGARANYA BIROKRASI YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERBASIS ELEKTRONIK



PETA PROSES BISNIS LEVEL 0

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN
FUNGSI 2 : SDM DAN MASYARAKAT BERKUALITAS

MANAJERIAL

UTAMA

LAINNYA

Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas

BJR F2_01

Terwujudnya masyarakat yang berkarakter dan memiliki kepribadian yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur

BJR F2_02

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN

BJR F2_01

Meningkatnya sumber daya manusia berkualitas melalui pengembangan pendidikan dan sistem kesehatan
BJR F2_1.1

Meningkatnya ketangguhan masyarakat melalui peningkatan daya beli, ketahanan pangan dan gizi serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
BJR F2_1.2

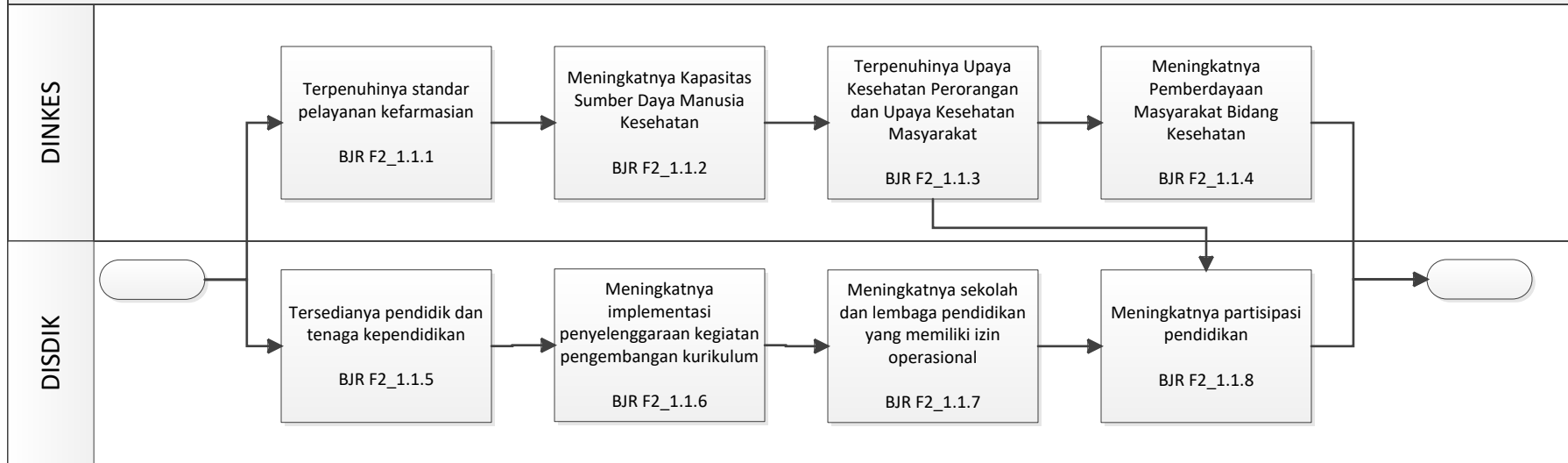
BJR F2_02

Meningkatkan pengamalan nilai-nilai pancasila, agama dan budaya
BJR F2_2.1

Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
BJR F2_2.2

PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 (BJR F2_1.1)

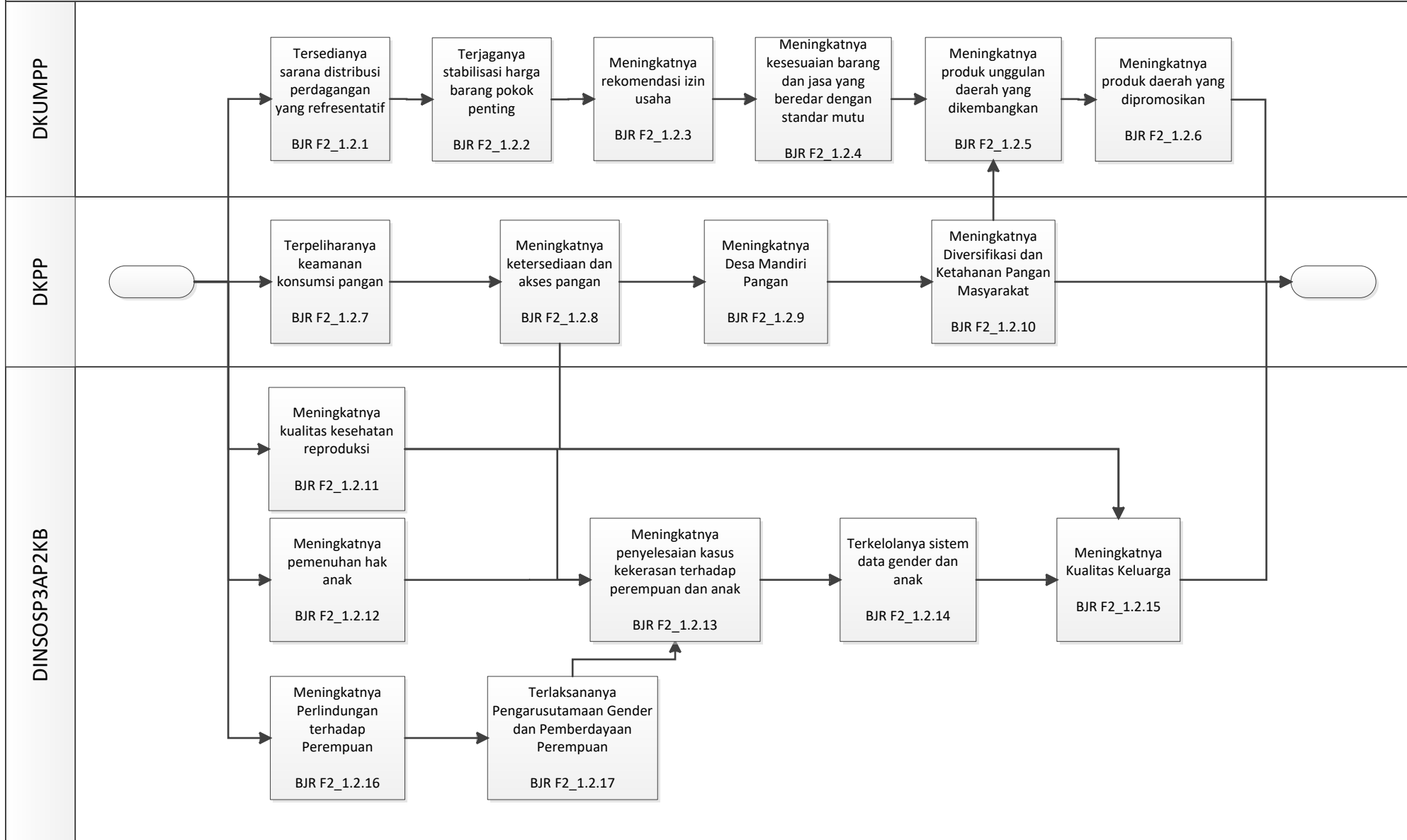
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN
MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS MELALUI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN SISTEM KESEHATAN



PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 (BJR F2_1.2)

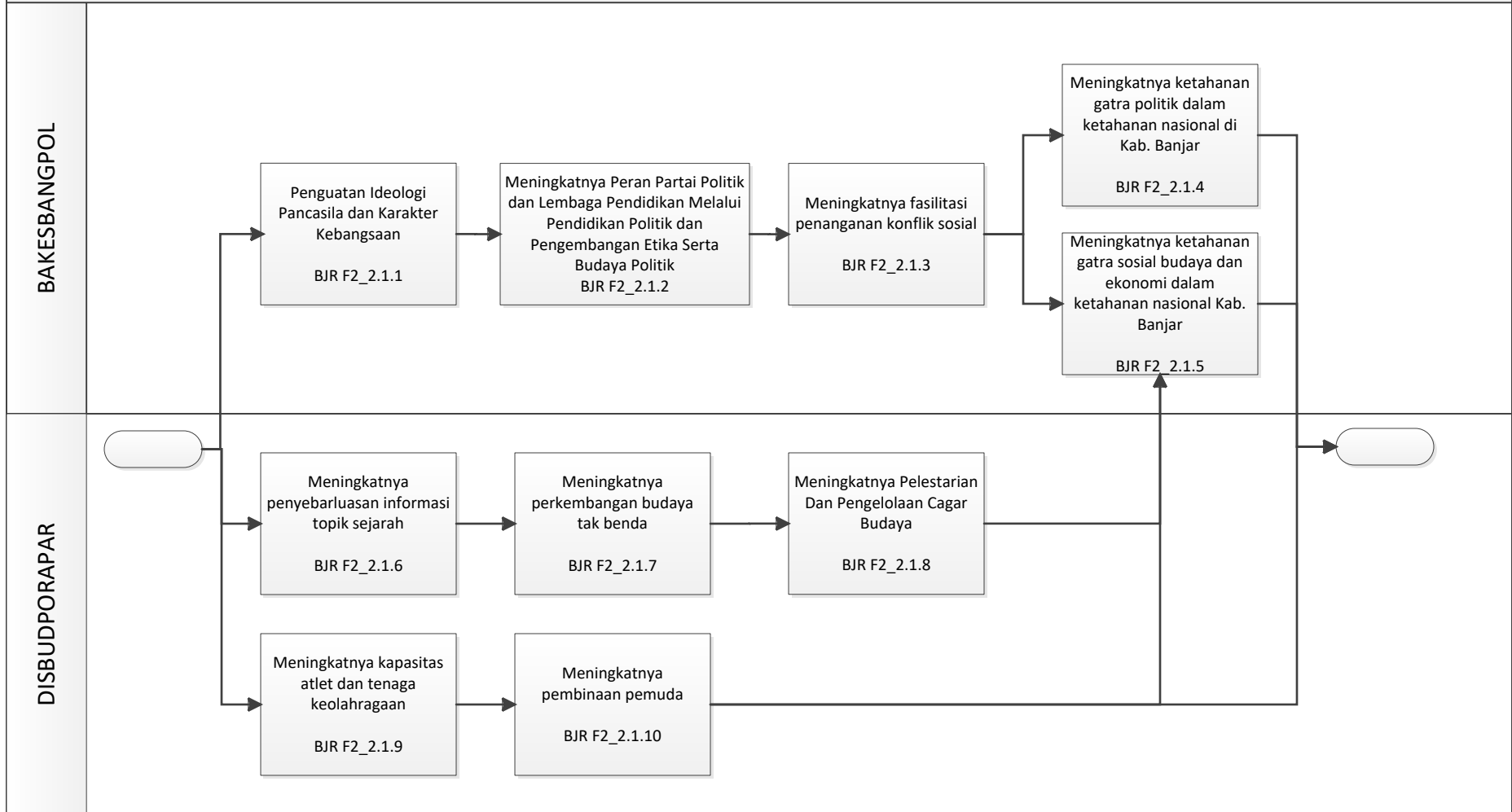
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN

MENINGKATKAN KETANGGUHAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN DAYA BELI, KETAHANAN PANGAN DAN GIZI SERTA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



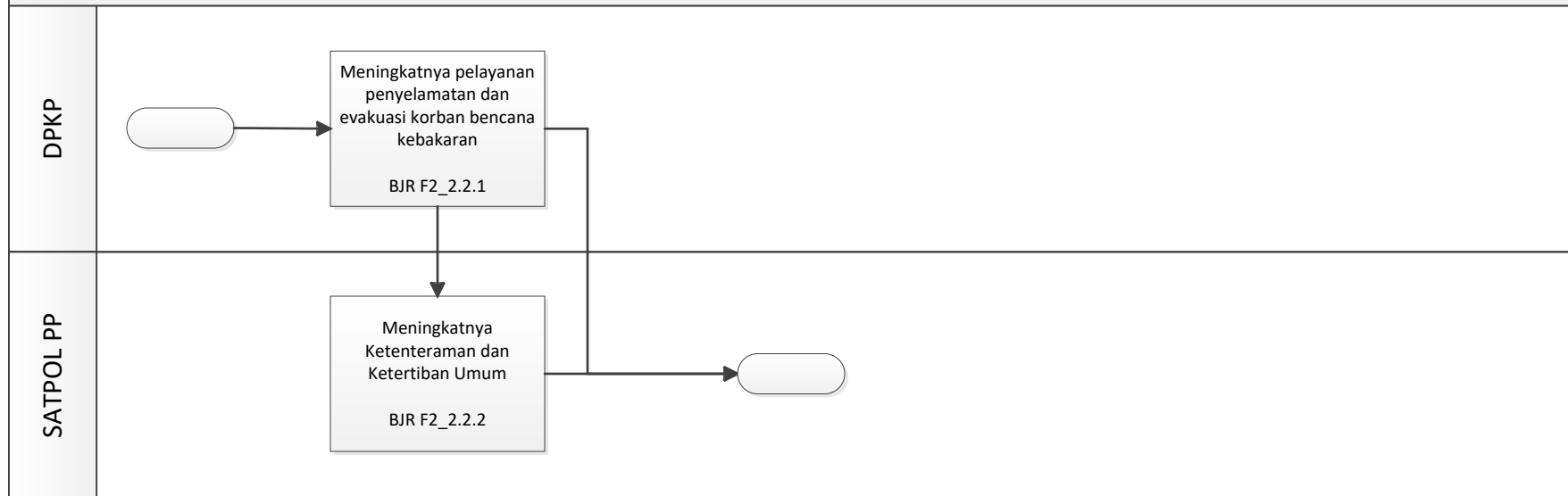
PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 (BJR F2_2.1)

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN MENINGKATKAN PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA, AGAMA DAN BUDAYA



PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 (BJR F2_2.2)

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN
MENINGKATKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN DI MASYARAKAT



PETA PROSES BISNIS LEVEL 0

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN
FUNGSI 3 : EKONOMI KERAKYATAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

MANAJERIAL

UTAMA

LAINNYA

Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas

BJR F3_01

Terwujudnya penurunan kemiskinan, Ketimpangan distribusi pendapatan dan angka pengangguran

BJR F3_02

Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan

BJR F3_03

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN

BJR F3_01

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi
BJR F3_1.1

Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan
BJR F3_1.2

Meningkatnya akselerasi industri pengolahan, Ekonomi kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital
BJR F3_1.3

BJR F3_02

Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan serta Berkembangnya reformasi sistem perlindungan sosial
BJR F3_2.1

Menurunnya Angka Pengangguran dan Berkembangnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM serta kemandirian ekonomi keluarga
BJR F3_2.2

Berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produksi pertanian dan perikanan dan pemantapan infrastruktur pembangunan
BJR F3_2.3

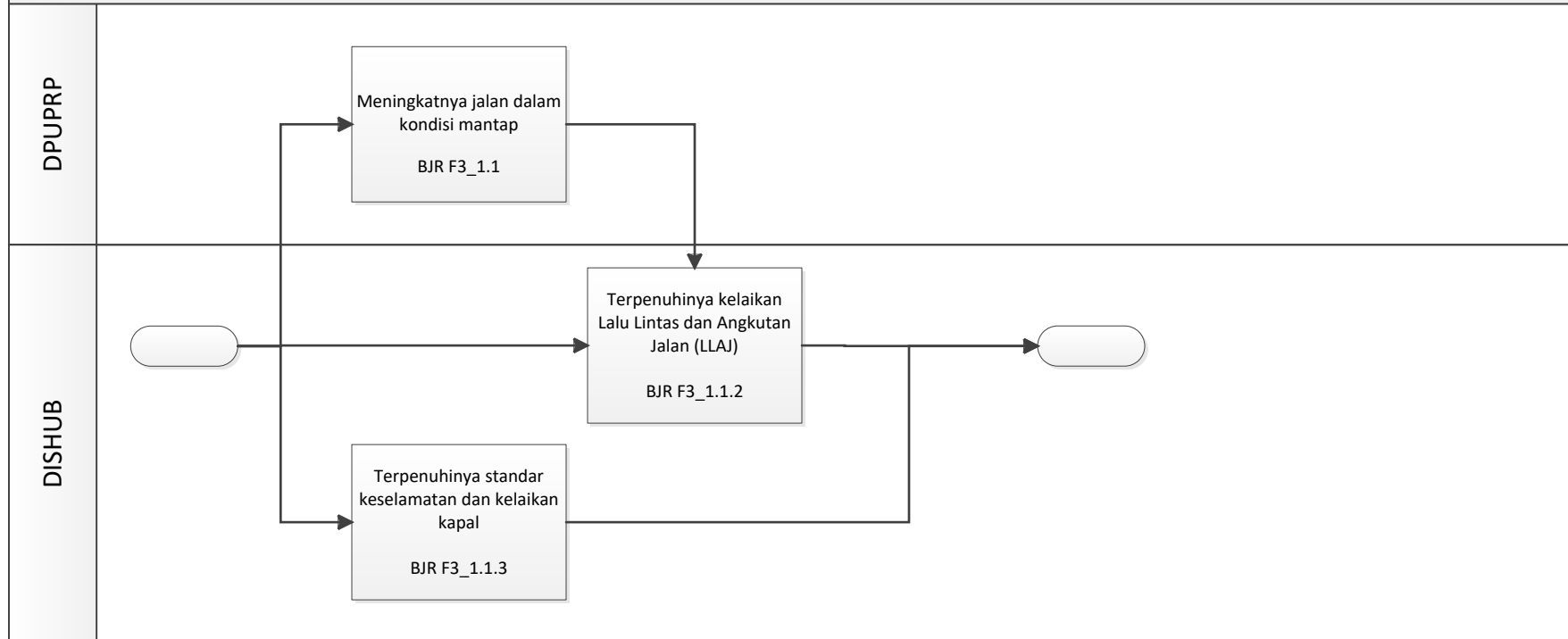
BJR F3_03

Terwujudnya penataan ruang dan permukiman yang terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan daerah
BJR F3_3.1

Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan untuk pembangunan berkelanjutan
BJR F3_3.2

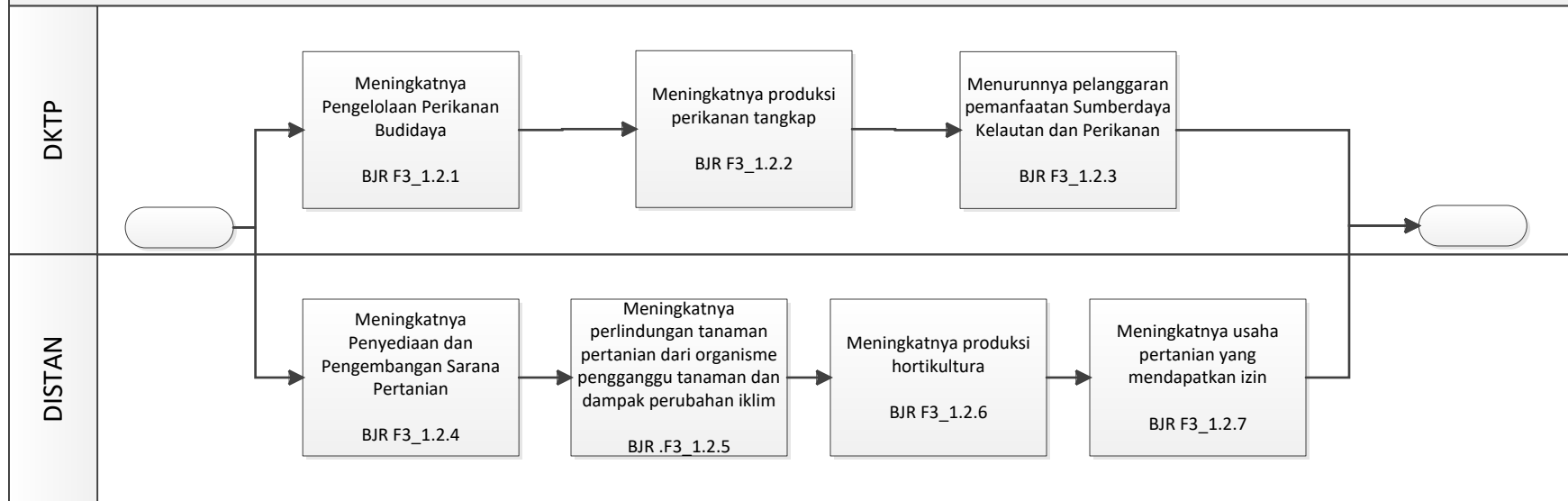
PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 (BJR F3_1.1)

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN
MENINGKATNYA KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN KONEKTIVITAS YANG MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI



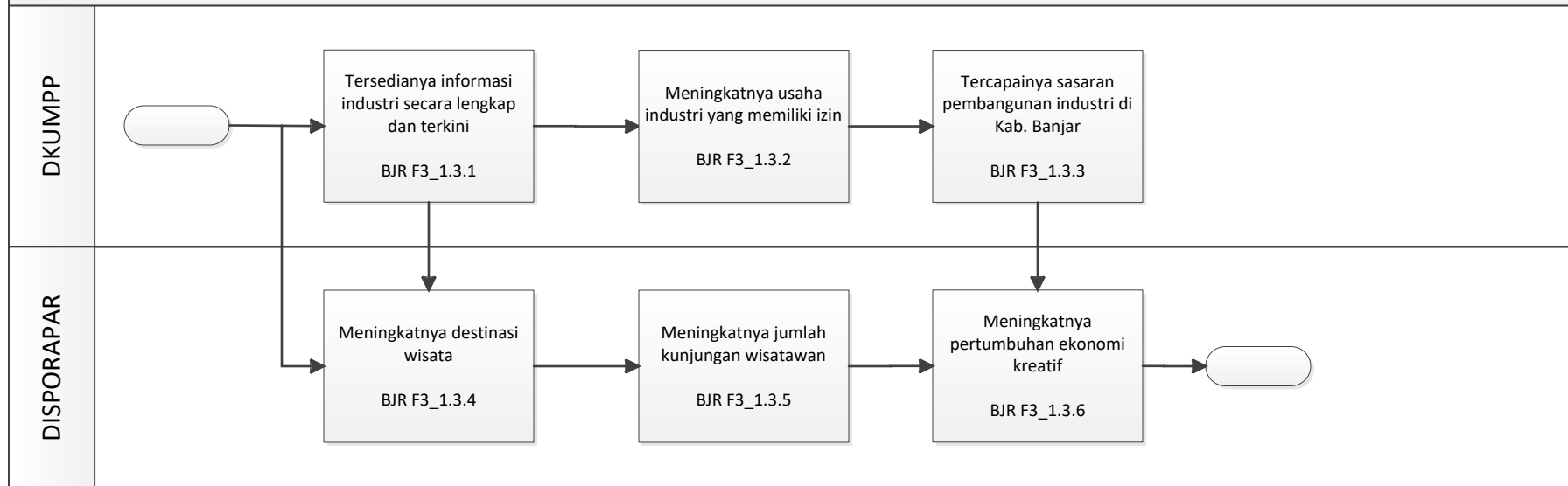
PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 (BJR F3_1.2)

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN
MENINGKATKAN KEUNGGULAN PERTANIAN DAN PERIKANAN



PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 (BJR F3_1.3)

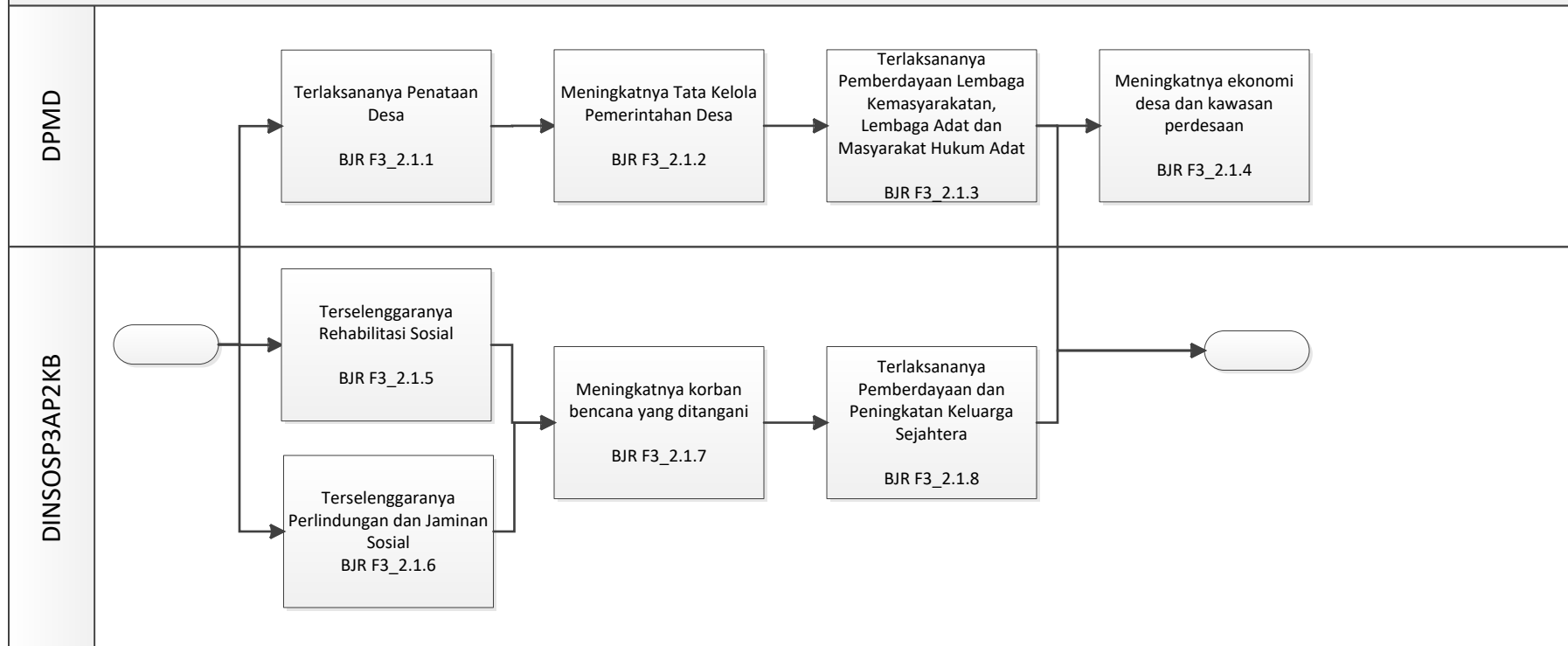
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN
MENINGKATKAN AKSELERASI INDUSTRI PENGOLAHAN, EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA, DAN EKONOMI DIGITAL



PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 (BJR F3_2.1)

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN

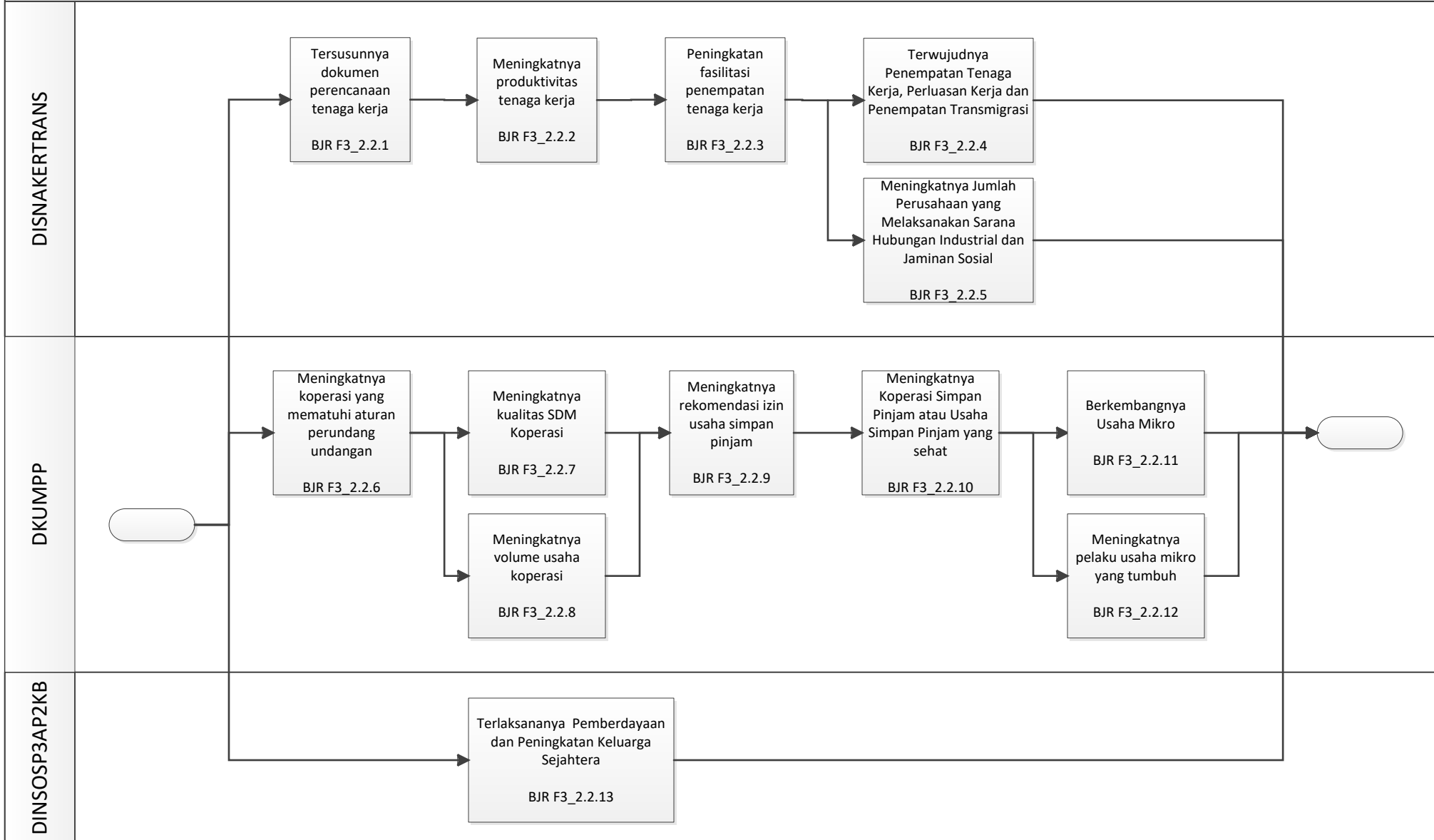
MENURUNNYA KEMISKINAN DAN KESENJANGAN DI PERDESAAN SERTA BERKEMBANGNYA REFORMASI SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL



PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 (BJR F3_2.2)

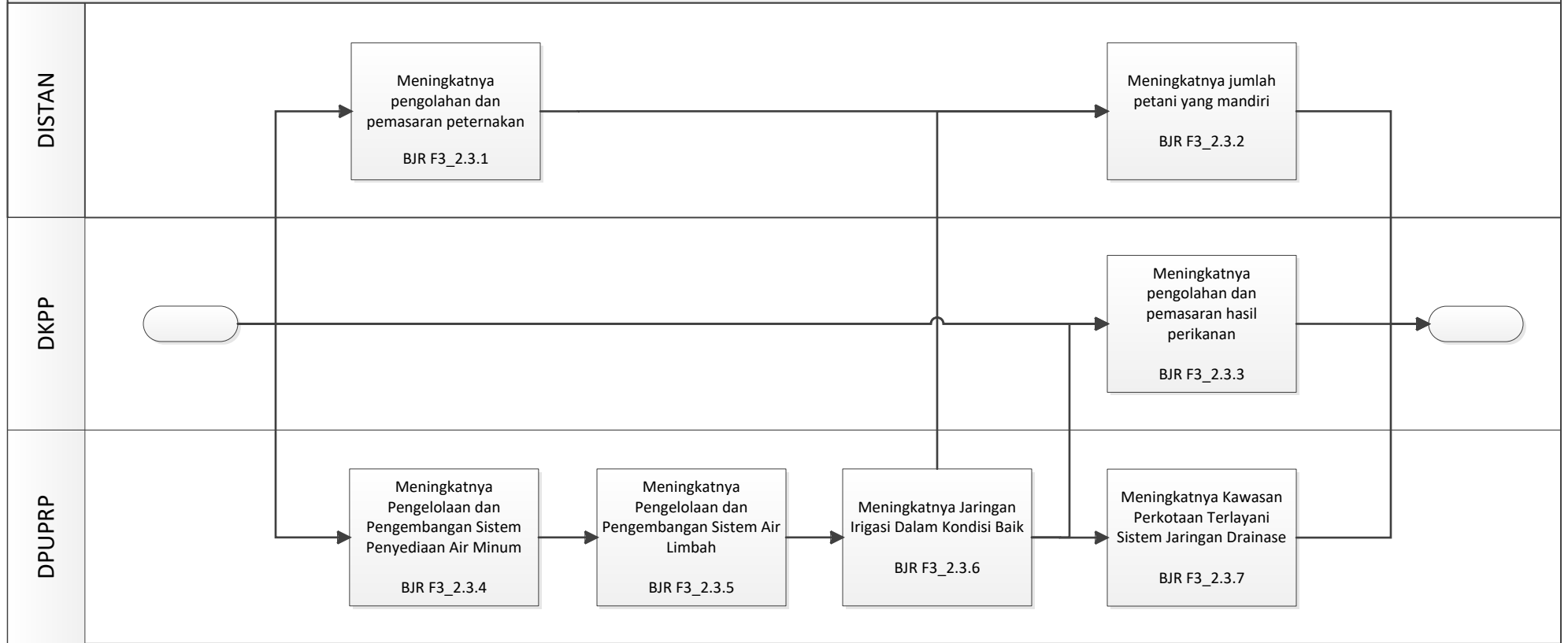
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN

MENURUNKAN ANGKA PENGANGGURAN DAN BERKEMBANGNYA PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING KOPERASI DAN USAHA MIKRO SERTA KEMANDIRIAN EKONOMI KELUARGA



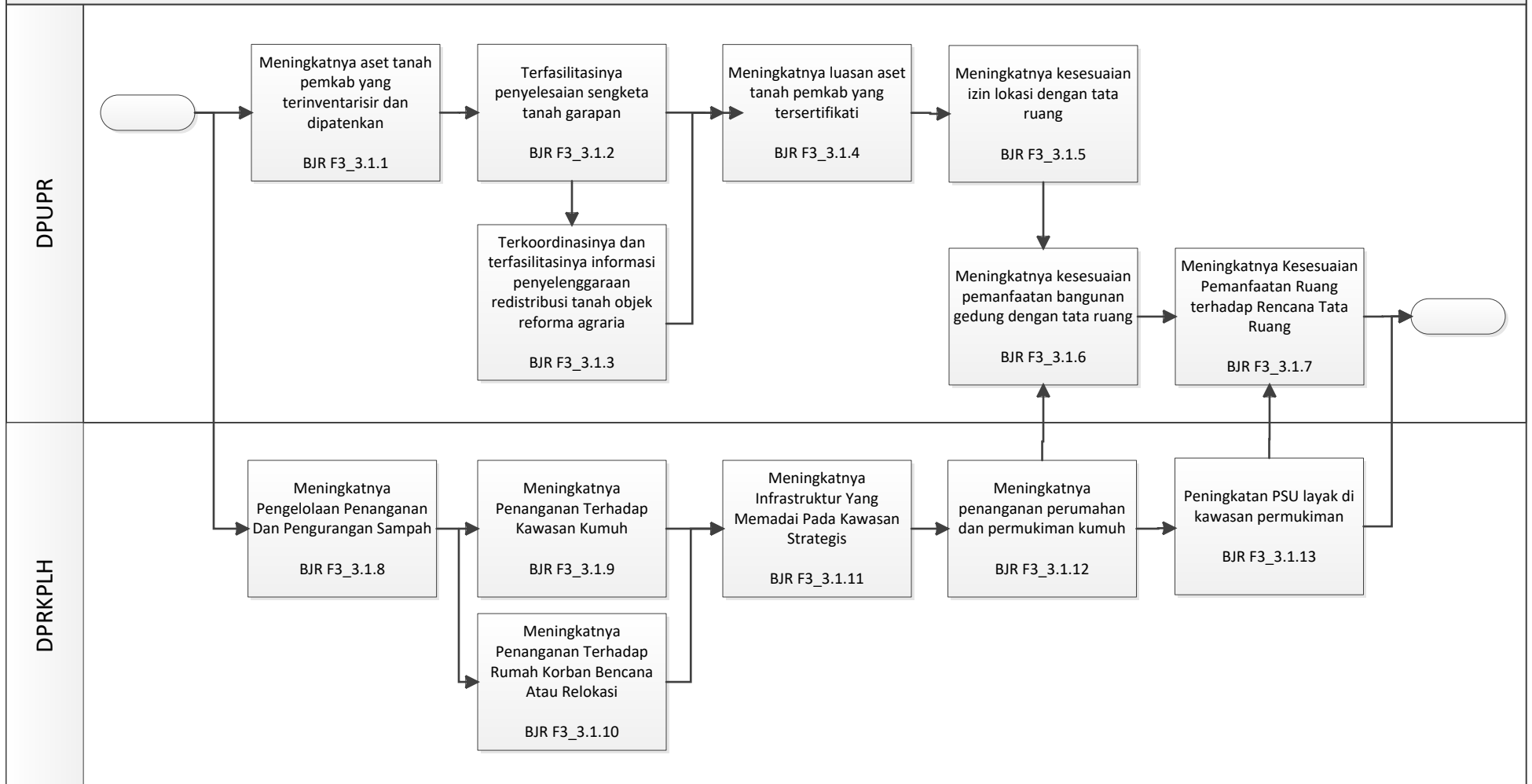
PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 (BJR F3_2.3)

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN
BERKEMBANGNYA EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN DAN PERIKANAN DAN MENANTAPAN INFRASTRUKTUR
PEMBANGUNAN



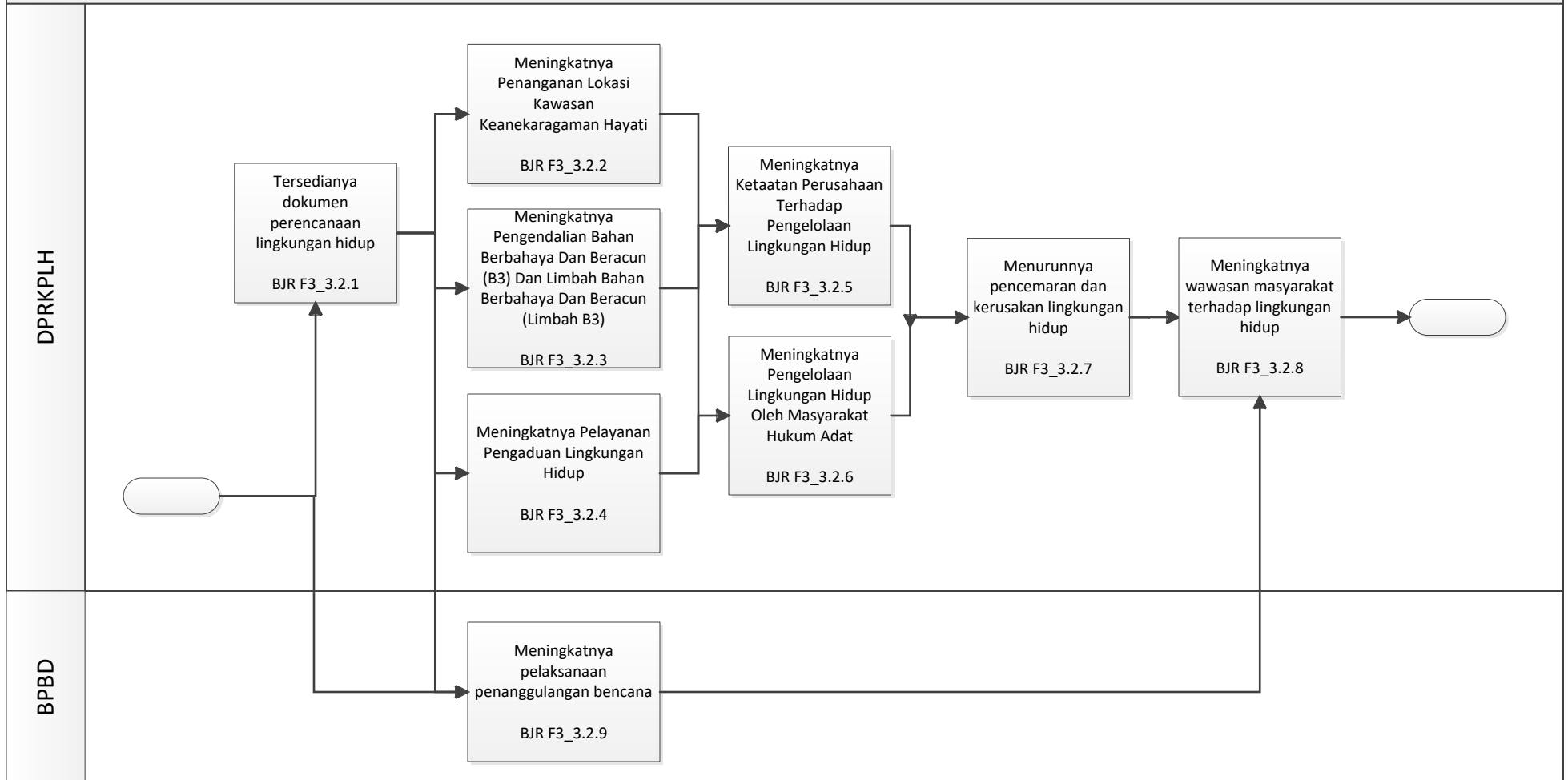
PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 (BJR F3_3.1)

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN
TERWUJUDNYA PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN YANG TERINTEGRASI DENGAN SELURUH SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH



PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 (BJR F3_3.2)

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN MENINGKATKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBENCANAAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



BUPATI BANJAR,

SAIDI MANSYUR